

“DANA BERGULIR BAGI USAHATANI”, AKANKAH BISA BERKELANJUTAN?: Studi Kasus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat¹

Mahdi dan Elfindri

Abstrak

Dana bergulir dikembangkan oleh banyak pemerintah daerah dalam mengatasi kelangkaan modal bagi usaha kecil pedesaan, terutama usahatani rakyat, setelah banyak skim kredit pedesaan dihentikan setelah krisis ekonomi. Paper ini menilai keberlanjutan dari dana bergulir yang dikembangkan di kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penilaian dilakukan dengan mengamati tingkat pengembalian kredit, suku bunga dan pengelolaannya. Ditemui bahwa tingkat kemacetan masih cukup tinggi dan suku bunga masih terlalu rendah, sehingga menjadi beban bagi manajemen dalam mempertahankan ketersediaan dana untuk perguliran. Dari sisi pengelolaan, masih ditemukan kuatnya campur tangan birokrasi dan bahkan campur tangan politik lokal dalam penyaluran dan pengelolaan kredit. Hal ini membuat keberlanjutan dana bergulir masih menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu, beberapa implikasi kebijakan ditawarkan, yakni memberikan pengelolaan kredit mikro kepada lembaga keuangan pedesaan yang sudah mapan. Subsidi sebaiknya diberikan kepada lembaga keuangan lokal tersebut untuk menjamin bahwa mereka menjangkau usaha kecil yang dikelola oleh rumahtangga miskin. Target penerima sebaiknya adalah juga penerima program kemiskinan yang lain agar dana untuk pengembangan usaha tidak digunakan untuk keperluan lain. Dan, memberikan fleksibilitas waktu pengembalian bagi penerima yang tingkat pengembalian usahanya tidak cukup besar.

Key Words: *dana bergulir, usahatani, tingkat pengembalian, keberlanjutan*

PENDAHULUAN

Salah satu rujukan "*success story*" penyediaan kredit pertanian dalam berbagai literatur adalah keberhasilan BRI menyediakan kredit usahatani dalam program Bimbingan Massal (BIMAS) (Patten *et al.*, 2001) dan kemudian bermertamorfosa menjadi BRI Unit Desa. Namun belakangan kredit usahatani (KUT) dihentikan karena tingginya tingkat kemacetan, terutama setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi (Febriamansyah *et al.*, 2002). Sejak itu, kredit pertanian bagi usahatani rakyat menghadapi ketidakpastian. Walau banyak program yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu permodalan usahatani rakyat seperti bantuan langsung masyarakat (BLM) (Febriamansyah *et al.*, 2003), namun sifatnya lebih pada bantuan darurat untuk menghadapi krisis ekonomi.

Seiring dengan implementasi kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah mengembangkan pula berbagai skema kredit mikro untuk mendorong berkembangnya usaha kecil dan sekaligus menanggulangi kemiskinan. Salah satu program penyediaan kredit yang banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah program dana bergulir (*revolving fund*), yang pada prinsipnya adalah penyediaan kredit mikro bagi usaha kecil dan menengah, terutama usahatani rakyat, ditengah kesulitan untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan konvensional. Program dana bergulir, pada dasarnya, bukanlah program yang baru, melainkan sudah berkembang semenjak pertengahan tahun 1980-an. Namun, sejak awal tahun 2000-an, program ini berkembang luas di banyak daerah di Indonesia, terutama di Sumatera Barat.

Sejauh ini, belum ditemukan hasil studi yang melaporkan apakah penyediaan kredit dengan pola bergulir ini untuk sektor pertanian dapat berkelanjutan atau tidak. Dalam paper ini, kami

¹ Paper bahan diskusi dalam penyampaian Laporan hasil penelitian kerjasama antara Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan (LPEP) dengan Pemerintah Kabupaten Agam, Lubuk Basung Tahun 2008

melaporkan hasil evaluasi terhadap program dana bergulir untuk sektor pertanian di kabupaten Agam Sumatera Barat. Adapun pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pemanfaatan dana bergulir dalam usahatani?, dan sejauh mana tingkat pengembalian dan perguliran dana kepada kelompok/pihak lainnya setelah kelompok/pihak pertama mengembalikan kreditnya?. Untuk menganalisis persoalan ini, kami memulai dengan mereview secara ringkas konsep kredit mikro, kredit pertanian dan dana bergulir. Kemudian dilanjutkan dengan membahas temuan tentang pengelolaan dana bergulir dan penilaian keberlanjutannya. Paper ini kami akhiri dengan kesimpulan dan implikasi bagi kebijakan penyediaan kredit mikro untuk usahatani.

KREDIT PERTANIAN

Ada dua kelompok pemikiran dalam perdebatan penyediaan kredit murah bagi usaha kecil. Kelompok pertama, penyediaan kredit murah dan mudah bagi pertanian, terutama untuk petani kecil dan subsisten, adalah penting untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani itu sendiri sekaligus mengembangkan perekonomian secara makro (Ahlin dan Jiang, 2008). Selain itu, adanya kredit memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha yang ramah lingkungan, karena tersedianya pembiayaan untuk mendukungnya (Anderson *et al.*, 2002). Akan tetapi disisi lain, penyediaan kredit murah bersubsidi ini akan membuat petani semakin tergantung dengan pihak luar yang mengganggu kemandiriannya dalam berusaha dan sekaligus mendorong komersialisasi pertanian yang pada ujung juga membuat petani semakin tergantung dengan input luar. Penyediaan kredit biasanya hanya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang memiliki lahan dan berpendapatan lebih yang akhirnya mendorong peningkatan kesenjangan pembagian pendapatan (Coleman, 2006). Adanya kredit dipedesaan menimbulkan tekanan bagi perubahan sosial dan pola produksi, dan biasanya, perempuan menjadi pihak yang dirugikan karena tertekan untuk ikut membantu dan bahkan menjadi target penyaluran kredit (Rahman, 1999).

Untuk usaha pertanian pedesaan, penyediaan kredit menghadapi persoalan yang lebih kompleks karena karakteristik usaha pertanian itu sendiri (Braverman dan Guasch, 1993), seperti :

1. Aktivitas usahanya sangat tergantung dengan musim sementara manajemen kredit mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan keadaan musiman tersebut. Petani memerlukan kredit untuk input pertanian saat mereka mulai bercocok tanam, sementara prosedur kredit belum tentu dapat mengeluarkan uang tunai pada saat dibutuhkan tersebut.
2. Pembayaran kredit hanya dapat dilakukan oleh petani saat musim panen. Sementara sistem perkreditan konvensional hanya dapat menerima pembayaran cicilan bulanan.
3. Usaha pertanian tersebar pada wilayah yang luas bahkan pada wilayah yang sulit dijangkau transportasi. Penyediaan kredit untuk tipe wilayah yang demikian memerlukan biaya yang lebih besar.
4. Pada daerah pedesaan ada kesulitan dalam mendapatkan tenaga yang terlatih dan bermotivasi tinggi dalam mengelola kredit kecil ini.
5. Sebagian besar petani menghadapi kesulitan dalam menyediakan agunan/jaminan.
6. Terdapat perbedaan antara hukum nasional dan hukum adat lokal yang menyebabkan kesulitan untuk menerapkan kontrak.

Sejarah penyediaan kredit bagi pertanian di Indonesia sudah cukup panjang. Sejak zaman penjajahan Belanda, kredit kecil bagi petani sudah diluncurkan (Djojohadikusumo, 1989). Kredit kecil menjadi motor penggerak utama dalam pelaksanaan Bimbingan Massal (BIMAS) yang disalurkan untuk menyediakan input berteknologi baru serta memotivasi petani untuk menerapkan teknologi baru dalam usaha tani guna mencapai target swasembada pangan. Diakhir tahun 1990-an saat mana hasil evaluasi penyediaan kredit usaha tani (KUT) dinilai gagal dalam hal pengembaliannya, maka sejak awal tahun 2000-an KUT ditiadakan dan pemerintah atas desakan DPR menyediakan dana cair yang langsung disalurkan ke kelompok tani dengan harapan, dana ini akan digulirkan oleh petani di dalam kelompoknya (Febriamansyah *et al.*, 2002). Sejak itu

dimulailah era baru dalam perkreditan kecil bagi pertanian di Indonesia. Dana bergulir menjadi terminologi yang banyak dirujuk dalam membicarakan kredit kecil untuk pertanian.

Keberlanjutan kredit mikro

Operasionalisasi kredit mikro dihadapkan pada dua pilihan yang bertentangan. Pada satu sisi, kredit mikro memiliki beban sosial untuk menyediakan kredit dengan prosedur dan biaya yang murah agar dapat dijangkau oleh peminjam miskin. Namun untuk menjangkau peminjam yang demikian memerlukan biaya operasional yang besar. Diperlukan administratur dan tenaga operasional lapangan yang lebih banyak. Sementara disisi lain, lembaga pengelola kredit mikro juga perlu memupuk modal melalui penetapan suku bunga dan mencari keuntungan dari investasinya untuk dapat beroperasi secara berkelanjutan. (Tedeschi, 2006) menyatakan bahwa lembaga kredit mikro yang beroperasi secara berkelanjutan adalah lembaga yang dapat beroperasi untuk jangka panjang. Keberlanjutan ini dapat dicapai bila lembaga tersebut mampu menutupi biaya modal dan biaya administrasi dengan menetapkan tingkat bunga yang realistis. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan (equilibrium) antara tujuan menjangkau lebih banyak peminjam dari kelompok miskin dan kemampuan untuk memupuk modal. Dua fungsi yang saling bertentangan ini membuat pengelolaan lembaga kredit mikro menghadapi beban kerja yang berbeda dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional yang semata-mata berorientasi profit. Untuk dapat berkelanjutan, lembaga keuangan mikro harus mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup untuk menutupi semua biaya operasinya. Tingkat pengembalian modal ditentukan oleh tingkat bunga dan kredit macet (non performing loan). Penetapan bunga, r , yang cukup tinggi dan rendahnya tingkat kemacetan memungkinkan lembaga keuangan mikro bertahan melanjutkan bisnisnya.

Terdapat dua penyebab kredit macet yaitu tidak mau bayar (*strategic default*) dan usaha gagal (*negative economic shock*). Kemacetan karena tidak mau bayar dapat diminimalisir melalui kontrak kredit yang menyediakan disinsentif bagi penunggakan. Kemacetan kredit karena usaha gagal adalah kejadian diluar kontrol baik oleh peminjam maupun oleh lembaga penyedia kredit.

Apa itu dana bergulir dan apakah efektif?

Dana bergulir adalah dana yang dipinjam pada individu/kelompok yang apabila dilunasi akan dipinjamkan/diputarakan kepada individu/kelompok lainnya. Pola kredit demikian dikembangkan dengan maksud untuk menekan tingkat kemacetan kredit, karena individu/kelompok tunggu akan mengawasi penggunaan dan pengembalian kredit dari penerima kredit tahap pertama.

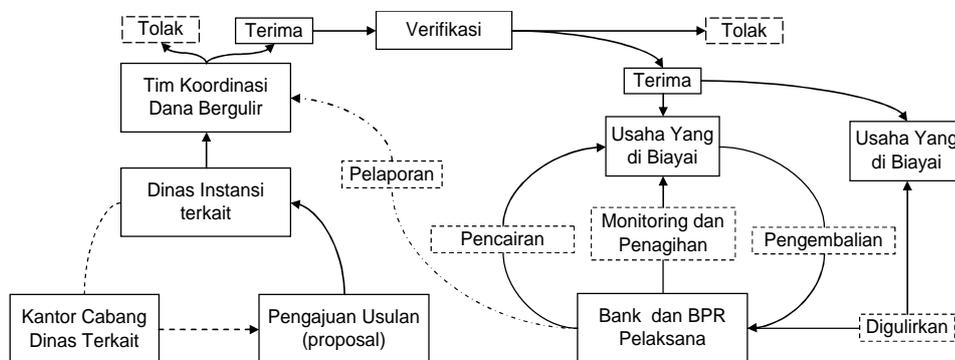
Analisis sustainabilitas kredit mikro yang banyak dilaporkan adalah untuk pengelolaan kredit yang berterusan yaitu peminjam dapat meminjam kembali ke lembaga keuangan mikro apabila telah melunasi pinjamannya, baik pelunasan dalam fase pinjaman maupun dalam fase hukuman. Dengan demikian, peminjam dapat mengembalikan pinjaman dengan tingkat keuntungan usahanya yang wajar. Sementara, dalam pendekatan dana bergulir, peminjam yang telah melunasi kredit tidak lagi mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pinjaman periode berikutnya (periode $T+1$), karena dana yang telah dikembalikan ini akan dipinjamkan kepada kelompok lain yang belum mendapatkan pinjaman (kelompok tunggu). Agar usaha kecil yang dibiayai oleh dana bergulir ini dapat mempertahankan kegiatan usahanya setelah fase pinjaman, maka tingkat keuntungan usahanya tentunya lebih tinggi dari usaha yang dibiayai oleh lembaga kredit konvensional. Oleh karena itu, efektifitas dana bergulir, baik dalam menyediakan bantuan modal bagi usaha kecil, maupun keberlanjutan manajemen internalnya masih diragukan.

DANA BERGULIR UNTUK USAHATANI DI KABUPATEN AGAM: Sebuah Kasus

Pengelolaan dana bergulir

Berbagai daerah menyediakan dana bergulir untuk mendorong perkembangan perekonomian daerahnya dan menjadi instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Di kabupaten Agam, program dana bergulir diluncurkan pada tahun 2001. Pemerintah Kabupaten Agam melibatkan pihak perbankan dalam membantu mengelola dan menyalurkan dana yang sudah dianggarkan melalui APBD tersebut. Selain pihak perbankan, program ini juga melibatkan instansi terkait dengan bidang usaha yang akan menerima kredit, dalam memverifikasi dan membimbing penerima menjalankan usahanya. Untuk itu, dibentuk sebuah badan koordinasi yang bernama Tim Koordinasi Dana Bergulir yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dianggotai oleh dinas instansi terkait serta bank yang ditunjuk sebagai pengelola dan penyalur. Tim koordinasi melakukan seleksi atas kelompok atau individu penerima, lalu kemudian calon penerima diverifikasi dengan melihat kecocokan persyaratan yang diajukan dengan keadaan lapangan. Penerima kredit dapat menarik pinjamannya pada bank atau BPR yang ditunjuk (gambar 1). Prosedur yang demikian dibuat untuk maksud agar penerima terseleksi sedemikian rupa untuk menekan kegagalan bayar serendah mungkin. Kemudian disisi lain penerima adalah orang yang sangat membutuhkan kredit bagi pengembangan usahanya.

Gambar 1. Prosedur dan mekanisme pengelolaan dana bergulir di Kabupaten Agam



Digunakan dua pendekatan dalam penyaluran dan pengelolannya, yaitu pendekatan individu dan pendekatan kelompok. Pendekatan individu yakni penerima program adalah individu yang mana perguliran dana dilakukan oleh

pihak bank dan BPR yang ditunjuk kepada individu penerima berikutnya sesuai hasil dari seleksi yang dilakukan oleh tim koordinator. Sementara penerima kelompok pada prinsipnya yang menerima adalah individu, akan tetapi pergulirannya kepada anggota kelompok lainnya yang belum menerima. Akan tetapi, proses pengembalian dana, pencairan dan pencuilannya tetap melalui bank dan BPR yang ditunjuk. Pengawasan dan penagihan kepada kelompok dapat dilakukan lebih mudah karena kelompok penerima melakukan kontrol secara internal, dimana anggota kelompok yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan akan menjadi tanggung jawab kelompok untuk menemukan jalan keluar secara bersama.

Sampling Penelitian

Untuk menjawab penelitian ini maka dilakukan pemetaan sampel yakni sekitar 25-35% dari populasi. Populasi adalah mereka yang masuk ke dalam program dana bergulir, baik secara individu maupun kelompok dan menggunakan pinjamannya untuk usaha pertanian. Sementara mereka yang menerima program kemiskinan yang diluar dana bergulir tidak dijadikan sebagai populasi dari penelitian ini. Ada sebanyak 73 penerima program dana bergulir yang menggunakannya untuk usahatani, maka diperoleh sebanyak 25 sampel dan sisanya adalah *control group*, yaitu rumah tangga yang tidak menerima program, namun memiliki usaha yang sama dengan responden yang menerima program. Pemilihan responden sampel didasari atas daftar nama yang ada bagi penerima program *revolving* yang pernah sebelumnya. Program yang menjadi fokus kajian adalah dana bergulir dilaksanakan semenjak tahun 2003, 2004, dan 2005. Dana sebelum tahun 2003 tidak dianalisis untuk menghindari *memory leaps*. Selain itu, indepth interview dilakukan pada

penyelenggara program baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk menelaah pendapat dan pengalaman mereka dalam mengelola dana bergulir serta kesulitan dan rekomendasi perbaikan program yang mereka sarankan.

Penjaringan informasi pada tingkat petani dan peternak penerima program dilakukan melalui survey unit usaha terhadap 25 petani, 20 peternak dan 15 orang responden bukan penerima program sebagai kontrol yang terdiri atas 10 orang responden kontrol petani dan 5 orang kontrol peternak. Karakteristik responden penerima kredit dan responden kontrol terlihat dalam tabel 1, besarnya pinjaman dan angsuran kredit responden tersebut terlihat dalam tabel 2. Dua BPR pengelola diwawancarai untuk mengetahui penilaian, kesulitan dan saran mereka, dua BPR tersebut adalah BPR Panampung dan BPR Tilatang Kamang. Petugas BPR yang diwawancarai adalah petugas yang bertanggungjawab dalam mengelola dana bergulir. Tiga unit instansi pemerintah juga diwawancarai guna mendapatkan penilaian mereka atas model dan pelaksanaan dana bergulir selama ini di Kabupaten Agam, ketiga instansi tersebut adalah Kecamatan Tilatang Kamang, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Survey dan wawancara dilakukan pada awal bulan Mei 2007.

Tabel 1. Karakteristik masyarakat penerima program dana bergulir kabupaten Agam

No	Karakteristik	Case						Control					
		Pertanian		Peternakan		Total		Pertanian		Peternakan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	<i>Jenis kelamin</i>												
	Laki-laki	23	92.00	17	85.00	40	88.89	8	80.00	4	80.00	12	80.00
	Perempuan	2	8.00	3	15.00	5	11.11	2	20.00	1	20.00	3	20.00
2	<i>Kelompok JAK</i>												
	1 - 3	3	12.00	3	15.00	6	13.33	3	30.00	1	20.00	4	26.67
	4 - 6	15	60.00	14	70.00	29	64.44	5	50.00	4	80.00	9	60.00
	> 6	7	28.00	3	15.00	10	22.22	2	20.00	-	-	2	13.33
3	<i>Pendidikan</i>												
	SD	10	40.00	6	30.00	16	35.56	4	40.00	1	20.00	5	33.33
	SLTP	4	16.00	5	25.00	9	20.00	3	30.00	-	-	3	20.00
	SMU	7	28.00	6	30.00	13	28.89	2	20.00	1	20.00	3	20.00
	D.I - III	1	4.00	2	10.00	3	6.67	-	-	-	-	-	-
	DIV/ Sarjana	3	12.00	1	5.00	4	8.89	1	10.00	3	60.00	4	26.67
4	<i>Kegiatan selama seminggu yang lalu</i>												
	Bekerja	24	96.00	18	90.00	42	93.33	10	100.00	5	100.00	15	100.00
	Mengurus rumah tangga	19	76.00	5	25.00	24	53.33	7	70.00	1	20.00	8	53.33
	Lainnya	16	64.00	12	60.00	28	62.22	3	30.00	3	60.00	6	40.00
5	<i>Jumlah hari kerja selama seminggu lalu</i>												
	0 Hari	-	-	1	5.00	1	2.22	-	-	-	-	-	-
	6 Hari	1	4.00	-	-	1	2.22	1	10.00	-	-	1	6.67
	7 Hari	24	96.00	19	95.00	43	95.56	9	90.00	5	100.00	14	93.33
6	<i>Jumlah jam kerja per minggu</i>												
	< 8	5	20.00	4	20.00	9	20.00	-	-	-	-	-	-
	8 - 21	14	56.00	12	60.00	26	57.78	-	-	-	-	-	-
	22 - 33	5	20.00	3	15.00	8	17.78	-	-	-	-	-	-
	> 33	1	4.00	1	5.00	2	4.44	10	100.00	5	100.00	15	100.00
7	<i>Pendapatan</i>												
	< 750.0000	2	8.00	9	45.00	11	24.44	2	20.00	3	60.00	5	33.33
	750.000 - 1.500.000	8	32.00	7	35.00	15	33.33	3	30.00	2	40.00	5	33.33
	1.500.001 - 2.250.000	7	28.00	4	20.00	11	24.44	4	40.00	-	-	4	26.67
	> 2.250.000	8	32.00	-	-	8	17.78	1	10.00	-	-	1	6.67
	Total	25	100.00	20	100.00	45	100.00	10	100.00	5	100.00	15	100.00

Metode Analisis

Untuk menilai keberlanjutan dana bergulir dalam membantu usaha kecil dan sekaligus keberlanjutan manajemen internalnya, analisis dilakukan dengan menilai tingkat kemacetan dan suku bunga pinjaman. Tingkat kemacetan yang tidak dapat berkelanjutan apabila berada diatas 30% dari total kredit yang dialokasikan. Pertimbangan ini didasarkan kepada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan subsidi bagi keberlanjutan manajemen dana bergulir untuk menutupi kredit yang macet tersebut.

Suku bunga pinjaman yang sustainable adalah suku bunga yang berada diatas tingkat inflasi agar dapat menutupi biaya modal.

Tabel 2. Penerima program menurut tahun penerimaan, besarnya pinjaman dan besarnya angsuran

No	Penjelasan	Pertanian		Peternakan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Tahun menerima dana						
	2002	2	8,00		-	2	4,44
	2003	3	12,00	11	55,00	14	31,11
	2004	6	24,00	1	5,00	7	15,56
	2005	5	20,00	4	20,00	9	20,00
	2006	9	36,00	4	20,00	13	28,89
2	Besar Pinjaman (Rp)						
	< 2.000.0000	7	28,00		-	7	15,56
	2.000.000 - 4.000.000	10	40,00	5	25,00	15	33,33
	4.000.001 - 6.000.000	6	24,00	14	70,00	20	44,44
	> 6.000.000	2	8,00	1	5,00	3	6,67
3	Besar Angsuran (Rp)						
	< 100.000	1	4,00	14	70,00	15	33,33
	100.000 - 200.000	9	36,00	4	20,00	13	28,89
	200.001 - 300.000	13	52,00		-	13	28,89
	> 300.000	2	8,00	2	10,00	4	8,89
	Total	25	100,00	20	100,00	45	100,00

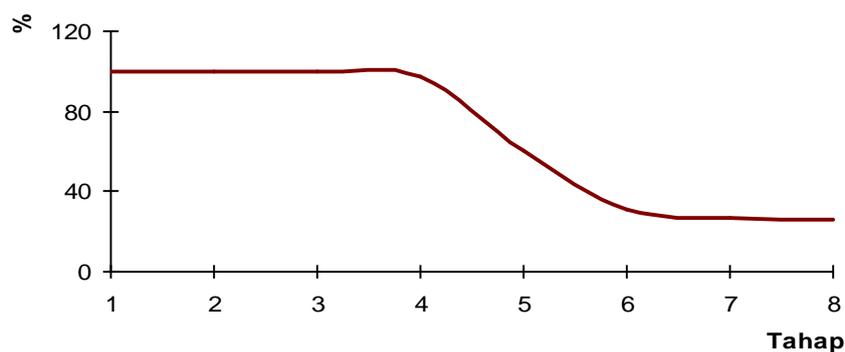
Selain itu, keberlanjutan juga dianalisis secara kualitatif yakni penilaian atas kemampuan dana bergulir menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, ketepatan waktu dan jumlah kredit, serta dinamika pengelolaannya. Penilaian ini dihimpun dari tiga kelompok responden, yaitu penerima

kredit, pegawai BPR dan bank penyalur dan dinas instansi terkait yang berhubungan dengan penyeleksian dan pembinaan teknis usaha penerima kredit. Tujuan utama analisis kualitatif ini adalah untuk mengetahui sejauhmana sistem dan kelembagaan yang dikembangkan mampu menjalankan misi untuk menyediakan kredit kecil bagi usahatani rakyat pada satu sisi dan mampu membuat dana tetap dapat digulirkan dalam jangka yang panjang.

TINGKAT PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN

Salah satu indikator dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian dan perguliran. Secara umum, gambar 3, pengembalian dan perguliran cenderung semakin membaik. Empat tahap pertama, tingkat pengembalian pinjaman sangat rendah. Keadaan kemudian membaik dengan cepat selama tahap 5 dan 6, dimana tingkat tunggakan pokok pinjaman berhasil ditekan dibawah 40%. Dua tahapan terakhir keadaannya konstan. Gambaran ini mengindikasikan pengelolaan dana bergulir mengalami perbaikan.

Gambar 3. Persentase tunggakan pokok pinjaman terhadap baki debit dana bergulir Kabupaten Agam selama delapan tahap pelaksanaannya



Sumber: Diolah dari laporan Bank nagari Cabang Lubuk Basung, 2007

Untuk sektor pertanian dan peternakan, pengembalian kredit yang dikategorikan macet adalah sebesar 30,17% (tabel 3). Sementara 56,9 % penerima dana bergulir membayar cicilannya dengan lancar. Menurut jenis usaha, persentase kemacetan terbesar ditemui pada usaha pertanian hortikultura dan diikuti oleh peternakan sapi dan peternakan ayam/itik.

Usaha tani jagung memperlihatkan tingkat kemacetan yang paling rendah. Namun demikian, usaha peternakan ayam/itik memperlihatkan persentase yang besar yang masuk kategori kurang lancar pembayarannya.

Tabel 3. Kelancaran pembayaran kembali dana bergulir pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung per akhir Februari 2007 menurut jenis usaha

No	Kelancaran pembayaran	Jenis usaha										Total	
		Peternakan Sapi		Peternakan Ayam/Itik		Hortikultura*		Jagung		Lainnya			
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Lancar**	20	52,63	4	57,14	16	45,71	22	81,48	4	44,44	66	56,90
2	Kurang Lancar	2	5,26	1	14,29	2	5,71	2	7,41	3	33,33	10	8,62
3	Diragukan	2	5,26	0	0,00	1	2,86	1	3,70	1	11,11	5	4,31
4	Macet	14	36,84	2	28,57	16	45,71	2	7,41	1	11,11	35	30,17
	Jumlah	38	100,00	7	100,00	35	100,00	27	100,00	9	100,00	116	100,00

Sumber: Diolah dari Bank Nagari Cabang Lubuk Basung, 2007

Keterangan: * Usaha hortikultura terdiri atas usahatani cabe, tomat, kentang dan kubis bunga

** Lancar terdiri atas pinjaman yang sudah lunas dan yang membayar tepat waktu secara reguler

Sebagian besar penerima pinjaman menyatakan bahwa pinjaman digunakan sesuai dengan rencana dalam proposal awal (tabel 4). Sebagian besar responden adalah penerima yang tengah membayar cicilannya, yakni sebesar 57,78 % baik di lapangan usaha pertanian maupun pada lapangan usaha peternakan.

Bagi responden yang tengah mengangsur ini, 50% diantaranya mengakui bahwa cicilan pinjamannya kurang lancar (tabel 5). Penyebab utama gagal bayar adalah karena usaha gagal. Serangan hama penyakit sebagai penyebab yang membuat banyak usaha penerima program gagal. Ditemui pula ada penerima program yang mengakui bahwa dana pinjaman tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Ada tiga penilaian yang dijangkit dari tiga kelompok, yakni dari petani dan peternak penerima dana bergulir, bank dan BPR pelaksana dan dari instansi pemerintah pengelola. Dari sisi petani dan peternak penerima program, penilaian dimintakan terhadap dua hal yakni kesulitan yang dihadapi dan skema kredit dari sisi waktu dan kesesuaian plafon dengan kebutuhan finansial mereka. Dari sisi BPR pengelola penilaian dimintakan terhadap karakteristik nasabah yang cicilan kreditnya lancar dan yang macet serta penilaian mereka terhadap manajemen dana bergulir secara keseluruhan. Sementara itu dari sisi instansi pemerintah pengelola, penilaian dimintakan terhadap sistem pengelolaan dana bergulir dan pelaksanaannya.

Tabel 4. Penggunaan dana bergulir

No	Penjelasan	Pertanian		Peternakan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Kegunaan dana bergulir						
	Beli Anakan Sapi		-	19	95,00	19	42,22
	Beli Saprodi	1	4,00		-	1	2,22
	Modal Usaha	1	4,00	1	5,00	2	4,44
	Usahatani	7	28,00		-	7	15,56
	Usahatani Buncis	2	8,00		-	2	4,44
	Usahatani Cabe	6	24,00		-	6	13,33
	Usahatani Jagung	4	16,00		-	4	8,89
	Usahatani Lobak	1	4,00		-	1	2,22
Usahatani Tomat	3	12,00		-	3	6,67	
2	Status angsuran						-
	Sudah Lunas	9	36,00	7	35,00	16	35,56
	Belum mengangsur	2	8,00	1	5,00	3	6,67
	Masih mengangsur	14	56,00	12	60,00	26	57,78
	Total	25	100,00	20	100,00	45	100,00

Dari sisi petani dan peternak penerima program, sebagaimana terlihat pada tabel 6, prosedur yang berbelit, sulitnya mendapatkan jaminan dan proses pencairan yang memakan waktu lama adalah kesulitan yang dihadapi dalam mendapatkan bantuan kredit dari program dana bergulir ini. Prosedur yang berbelit dan memakan waktu yang lama ini adalah konsekuensi dari prosedur dan mekanisme pengelolaan dana bergulir sebagaimana terlihat pada bagan 1 diatas. Penyediaan permodalan dana

bergulir menjadi sulit mengikuti irama kebutuhan permodalan pengusaha kecil pertanian dan peternakan ini.

Tabel 5. Kelancaran pembayaran

No	Penjelasan	Pertanian		Peternakan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Pembayaran kembali						
	Lancar	7	50,00	6	50,00	13	50,00
	Kurang lancar	7	50,00	6	50,00	13	50,00
2	Penyebab kurang lancar						
	Usaha gagal	5	71,43	5	83,33	10	76,92
	Keperluan pendidikan	1	14,29	-	-	1	7,69
	Lainnya	1	14,29	1	16,67	2	15,38

Sebagian besar responden menilai bahwa plafon yang disediakan oleh dana bergulir tidak sesuai dengan kebutuhan permodalan mereka. Sebagian besar diantaranya menilai bahwa plafon yang disediakan tersebut terlalu kecil sehingga dalam implementasinya mereka tetap menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Sebesar 73,33% diantara responden menyatakan hal yang demikian. Kekurangan tersebut paling dirasakan oleh responden yang berusaha di pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dimana 80% diantaranya menyatakan plafon yang disediakan masih kurang. Waktu pencairan yang tidak tepat adalah keluhan kedua yang dirasakan oleh penerima kredit. Sebesar 31,11% diantaranya menyatakan bahwa pencairan kredit dengan kebutuhan permodalan mereka tidak tepat. Pada usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketidaktepatan ini paling besar dirasakan, karena karakteristik usahanya yang musiman menuntut penyediaan modal cair berfluktuasi menurut waktu. Biasanya kebutuhan finansial meningkat saat pengolahan tanah dan penanaman dilakukan. Kredit yang likuid tidak dalam rentang waktu tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

Dari sisi BPR pelaksana, ada lima hal yang menentukan keberhasilan pembayaran kembali dana bergulir yang disalurkan ke masyarakat. **Pertama** adalah karakter pribadi penerima program. Kejujuran penerima adalah kriteria yang sangat menentukan keberhasilan pembayaran kembali. Kolateral ada di urutan kedua. Selama ini BPR tidak dapat memutuskan secara mandiri siapa penerima program, melainkan secara bersama di dalam tim koordinasi. Hasil rekomendasi tim koordinasi terkadang tidak selalu sesuai dengan penilaian BPR. Kredit yang macet sebagian besar adalah penerima yang menurut BPR tidak memenuhi kriteria karakter yang bankable. Kelompok atau individu penerima yang tingkat keberhasilannya tinggi adalah kelompok dan individu yang memenuhi kriteria perbankan, terutama karakter yang baik. Kelompok yang demikian biasanya adalah kelompok yang memang menurut hemat pengelola BPR layak untuk menerima kredit. Sementara kelompok atau individu penerima yang banyak macet kreditnya adalah kelompok dan individu yang secara kriteria bank tidak layak, akan tetapi dipaksakan oleh pihak penyedia dana, dalam hal ini pemerintah kabupaten.

Tabel 6. Penilaian petani dan peternak penerima program terhadap dana bergulir

No	Penjelasan	Pertanian		Peternakan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Kesulitan dalam memperoleh dana bergulir						
	Prosedur berbelit-belit	7	28,00	-	-	7	15,56
	Masalah Jaminan	2	8,00	6	30,00	8	17,78
	Proses pencairan lama	9	36,00	4	20,00	13	28,89
	Tidak dapat informasi	2	8,00	4	20,00	6	13,33
	Tidak memenuhi persyaratan kredit	1	4,00	4	20,00	5	11,11
2	Penilaian terhadap skema kredit						
	Waktu pencairan tidak tepat waktu	12	48,00	2	10,00	14	31,11
	Plafon tidak sesuai kebutuhan	20	80,00	13	65,00	33	73,33

Kedua adalah jenis usaha. Usaha yang berhasil mengembalikan kredit dengan baik adalah usaha peternakan, perdagangan dan industri kecil. Sementara usaha pertanian seperti cabe dan hortikultura lainnya tidak berhasil. Peternakan sapi misalnya, adalah primadona usaha di sekitar wilayah kerja BPR Panampung, kredit yang disalurkan ke unit usaha peternakan disekitar BPR Panampung ini dinilai berhasil. Di BPR Tilatang Kamang misalnya, kelompok atau individu penerima pada tahap awal banyak mengalami kegagalan bayar, terutama yang usahanya

adalah perikanan keramba. Hal ini terjadi karena usaha keramba mengalami kegagalan akibat penyakit herpes. Petani gambir di Palupuh, misalnya, memiliki tingkat kredit macet lebih tinggi.

Ketiga, jarak jangkauan BPR dengan lokasi nasabah juga salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembayaran kembali kredit yang disalurkan. Petugas bank mengalami kesulitan untuk memonitor dan menagih. Dana bergulir yang disalurkan lewat BPR Tilatang Kamang untuk petani dan peternak di Palupuh misalnya, banyak yang macet pengembaliannya. Pihak BPR mengalami kesulitan untuk terus memonitor dan menagih secara rutin karena daerahnya sulit di jangkau. Biaya pengelolaan kredit menjadi sangat besar jika monitoring dan penagihan dilakukan secara rutin seperti daerah lainnya.

Keempat, pemberian dana bergulir yang tingkat pengembaliannya tertinggi adalah dalam kelompok. Dimana anggota kelompok meminjam atas nama pribadi, namun secara bersama mereka memonitor pelaksanaan usaha dan pengembalian kredit. Kredit dikembalikan ke BPR dan kemudian BPR atas kesepakatan dengan kelompok memutar kembali kepada anggota kelompok yang lain yang belum mendapatkan kredit. Bahkan ada kelompok yang mengembangkan dana asuransi secara mandiri untuk menutupi kalau anggota yang gagal membayar pengembalian kredit. Sementara penyaluran dana melalui individu tingkat pengembaliannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kelompok

Kelima, konsistensi pelaksanaan prosedur juga merupakan faktor penentu. Kredit dana bergulir yang gagal bayar adalah mereka yang menerima sebagian besar tidak melewati prosedur yang sudah digariskan. Hal ini terjadi karena besar sekali kewenangan pemerintah kabupaten memutuskan siapa yang menerima kredit. Keputusan ini terkadang diambil tidak melewati prosedur, seperti adanya intervensi pejabat dan politisi lokal untuk menyediakan kredit bagi orang terlibat dalam proses politik. Hal ini menyulitkan bagi BPR pelaksana.

Selain itu, suku bunga sebesar 6% terlalu kecil bagi pengelola untuk dapat mengelola dana ini secara baik karena biaya yang diperlukan untuk mengelolanya cukup tinggi seperti biaya memonitor dan menagih yang dilakukan oleh petugas bank dan BPR secara rutin setiap minggunya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sisi sistem dan prosedur yang dibangun selama ini masih terdapat kelemahan, dimana berbagai pihak masih dapat mengintervensi sehingga mekanisme tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Manfaat program terhadap perkembangan usaha sebagaimana terpapar dalam tabel 7, sebagian besar responden memiliki usaha dengan omset yang berkisar antara Rp. 1 Juta sampai Rp. 3 juta, yakni mencapai 44,44 % untuk penerima program dan 73,33 % untuk responden kontrol. Hanya sekitar 4,44 % responden yang omsetnya diatas Rp. 5 juta. Keadaan ini memperlihatkan bahwa usahawan penerima dana bergulir ini adalah pengusaha yang tergolong sebagai pengusaha kecil.

Tabel 7. Omset, perkembangan usaha dan penyebab omset usaha turun selama setahun terakhir

No	Penjelasan	Case						Control					
		Pertanian		Peternakan		Total		Pertanian		Peternakan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Omset per bulan												
	< 1.000.000	2	8,00	7	35,00	9	20,00	2	20,00	1	20,00	3	20,00
	1.000.000 - 3.000.000	16	64,00	4	20,00	20	44,44	7	70,00	4	80,00	11	73,33
	3.000.001 - 5.000.000	6	24,00	8	40,00	14	31,11	1	10,00	-	-	1	6,67
	> 5.000.000	1	4,00	1	5,00	2	4,44	-	-	-	-	-	-
2	Perkembangan usaha setahun terakhir												
	Bertambah baik	11	44,00	1	5,00	12	26,67	1	10,00	1	20,00	2	13,33
	Sama saja	6	24,00	13	65,00	19	42,22	6	60,00	2	40,00	8	53,33
	Menurun	8	32,00	6	30,00	14	31,11	3	30,00	2	40,00	5	33,33
	Total	25	100,00	20	100,00	45	100,00	10	100,00	5	100,00	15	100,00
3	Penyebab omset turun												
	Harga jual menurun	4	50,00	1	16,67	5	35,71	-	-	-	-	-	-
	Kesulitan dalam pemasaran	1	12,50	-	-	1	7,14	-	-	-	-	-	-
	Kekurangan modal	1	12,50	1	16,67	2	14,29	3	100,00	1	50,00	4	80,00
	Lainnya	2	25,00	4	66,67	6	42,86	-	-	1	50,00	1	20,00
	Total	8	100,00	6	100,00	14	100,00	3	100,00	2	100,00	5	100,00

Penilaian responden terhadap perkembangan usahanya selama setahun terakhir memperlihatkan bahwa sebagian besar responden baik penerima program maupun responden kontrol merasakan perkembangan usahanya sama saja atau tidak mengalami perkembangan atau stagnan.

Namun demikian, ada perbedaan secara persentase jumlah responden penerima program dibandingkan dengan responden kontrol. Responden penerima program 42 % lebih diantaranya menilai bahwa usahanya stagnan, sementara responden kontrol mencapai 53 %. Diantara responden penerima program, responden pada usaha peternakan merasakan stagnan lebih besar dibanding usaha pertanian, yakni berturut-turut 65 % dan 24 %. Menariknya, responden dari usaha pertanian menyatakan usahanya bertambah baik sebanyak 44 %, sementara responden kontrolnya hanya 10 % diantaranya. Sedangkan pada usaha peternakan responden yang merasakan usahanya semakin membaik selama setahun terakhir hanya 5 % sedangkan kontrolnya mencapai 20 %. Sementara itu, sisanya adalah responden yang merasakan usahanya menurun selama setahun terakhir

Dua kesimpulan dapat dipetik dari gambaran data tersebut. Pertama, bantuan dana bergulir memberikan dampak positif yang baik dan signifikan bagi pengembangan usaha masyarakat di sektor pertanian, sementara di sektor peternakan peran dana bergulir tidak terasa oleh penerima program dalam pengembangan usahanya. Hal ini terjadi karena perputaran usaha lebih cepat di usaha pertanian hortikultura dibanding dengan usaha peternakan. Usaha peternakan penggemukan sapi memerlukan waktu yang lebih lama untuk memperlihatkan perkembangan usahanya. Sementara usaha pertanian hortikultura biasanya memerlukan waktu 3-4 bulan untuk satu kali panen. Dengan nilai pinjaman yang lebih rendah dibanding peternakan, pertanian hortikultura memberikan omset yang lebih baik.

DISKUSI DAN KESIMPULAN: Keberlanjutan Dana Bergulir Untuk Usahatani

Secara umum karakteristik umum usaha pertanian yang membuat penyaluran kredit kecil tidak sederhana sebagaimana dikemukakan oleh Braverman dan Guasch (1993) diatas juga ditemui dari hasil survey di Kabupaten Agam ini. Ada **empat kendala** yang dihadapi oleh pengelola program dan petani penerima program. **Pertama** prosedur pengelolaan yang dinilai oleh sebagian besar penerima program agak rumit dan berbelit. Prosedur yang demikian memerlukan waktu yang lama sejak awal target sasaran mengajukan proposal sampai kreditnya diuangkan. Panjangnya waktu ini menyebabkan nilai uang menjadi berubah. Petani sangat memerlukan uang tunai saat awal musim tanam dan saat mana volume kerja sedang memuncak, pada saat tersebut kebutuhan akan uang cash untuk menopang permodalan usaha sangat dibutuhkan. Bila kredit yang diajukan tidak dapat dicairkan pada waktu yang tepat tentunya keberadaan dana bergulir menjadi kurang mampu membantu petani dalam penyediaan modal. Kredit yang dicairkan tidak pada waktu petani membutuhkan dapat berpeluang disalahgunakan untuk kepentingan diluar usaha. Selain itu, uang yang tidak dicairkan tepat waktu akan kembali menumpuk di tabungan nasabah, maka yang terjadi adalah rente ekonomi, saat mana nasabah menikmati bunga tabungan yang lebih tinggi dari bunga kredit yang harus mereka bayar, karena bunga kredit disubsidi.

Kedua, kegagalan bayar kembali juga terjadi saat mana kredit dana bergulir disalurkan dengan jaminan yang lemah. Untuk itu, persoalan keterjaminan bayar kembali juga dibutuhkan, terutama bagi pihak bank dan BPR pengelola agar pengelolaan kredit tidak memberikan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, pihak petani penerima program tetap mesti menyediakan kolateral walau dengan persyaratan yang lebih ringan. Selain itu, karakter yang bankable adalah pertimbangan utama pihak bank dan BPR pengelola sebagai bentuk lain dari jaminan. Namun sebelumnya pihak bank dan BPR pengelola mesti memiliki kewenangan yang lebih besar dalam memutuskan siapa penerima kredit. Walau pola ini akan melahirkan mekanisme yang murni hanya mengandung pertimbangan kelayakan finansial dan mengabaikan aspek sosial, yakni penurunan angka kemiskinan.

Ketiga, proses dan prosedur yang ada selama ini menyediakan peluang bagi intervensi pihak luar maupun internal pengelola. Intervensi ini memerlukan konsekuensi negatif terhadap pelaksanaan

program secara keseluruhan, selain akan menjatuh kewibawaan lembaga pengelola itu sendiri. Keanggotaan tim koordinasi yang terdiri atas pejabat di dinas dan instansi terkait, BPR dan bank pengelola sangat rentan bila atasan maupun politisi lokal mengintervensi dalam mengambil keputusan.

Keempat, kriteria penerima program sangat longgar dan tidak terkelompok atas kemampuan dan pengalaman usahanya. Selain itu, ada kekaburan antara pengembangan usaha dan pengurangan angka kemiskinan. Bantuan dana bergulir juga terkadang ditafsirkan sebagai bantuan untuk mengurangi angka kemiskinan. Oleh berbagai pihak keadaan demikian dianggap bahwa dana bergulir adalah bantuan lepas, yang merupakan salah satu penyebab gagal bayar. Pengelompokan masyarakat penerima program atas kelompok yang bankable dan mampu serta memiliki pengalaman dalam mengembangkan usaha dan kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan akan dapat membantu untuk mengurangi penyaluran kredit yang salah sasaran.

Hal yang dapat disimpulkan dari temuan ini adalah bahwa keberlanjutan dana bergulir bagi usahatani masih memerlukan beberapa diskusi lebih mendalam baik dari sisi konseptual maupun implementasi praktisnya. Dari sisi konseptual, sebagaimana didiskusikan diatas, bahwa dana bergulir memberkan beban yang lebih berat dari sisi manajemen internal pengelolaannya, sekaligus beban yang lebih berat bagi penerimanya karena mereka harus mengembangkan usaha dengan tingkat pengembalian dua kali lipat lebih besar dari usaha yang dibiayai kredit konvensional. Dari sisi praktis, kerumitan birokrasi dan kuatnya campur tangan birokrasi membuat pengelolaannya tidak independent dan banyak dicampuri oleh kepentingan politis, sehingga tingkat kemacetan katena *strategic default* menjadi besar.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Ada tiga implikasi kebijakan yang dapat ditawarkan berdasarkan temuan diatas. **Pertama**, diperlukan upaya yang kuat untuk menekan kegagalan bayar karena *strategic default* melalui pengembangan kelembagaan yang kuat atau dengan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada lembaga keuangan pedesaan yang sudah mapan seperti BPR atau lembaga keuangan lainnya agar penyaluran, pemantauan dan penagihan kredit dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang tepat. Peran sosial untuk menyediakan kredit bagi rumah tangga miskin, dapat dilakukan dengan menyediakan subsidi kepada lembaga keuangan pelaksana. Hal ini diperlukan untuk menekan seminimal mungkin tercampurnya kepentingan politik lokal dalam penyaluran kredit mikro ini.

Kedua, penerima kredit dari dana bergulir ini, hendaknya adalah juga penerima program penanggulangan kemiskinan lainnya, terutama penyediaan beasiswa bagi anak-anak mereka. Penyimpangan penggunaan dana bergulir terjadi karena sebagian besar digunakan untuk menutupi biaya pendidikan anak. Dengan penerima bantuan kemiskinan lainnya, penerima kredit mikro ini dapat mengalokasikan kreditnya sesuai dengan rencana semula, tentunya diikuti dengan monitoring yang kuat oleh lembaga penyalur kredit.

Keempat, diperlukan masa tenggang perguliran, yakni usaha-usaha yang tingkat pengembalian investasinya tidak cukup besar untuk dapat menggantikan dana yang digulirkan, tentunya, masih memerlukan pinjaman untuk melanjutkan usahanya. Usaha yang masuk dalam kelompok ini, pergulirannya akan menyulitkan untuk melanjutkan usaha, dan akan kembali terjebak ke kondisi awal sebelum menerima dana bergulir.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah kabupaten Agam yang mendanai penelitian ini. Sebagian informasi dalam paper ini telah dipublikasikan dalam buku "Makmur Bersama Masjid: Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani" yang ditulis oleh Prof. Elfindri dan Aristo Munandar yang diterbitkan oleh Baduose Media, 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlin, C., dan Jiang, N. (2008). Can micro-credit bring development? *Journal of Development Economics*, 86 (1), 1-21.
- Anderson, C. L., Locker, L., dan Nugent, R. (2002). Microcredit, Social Capital, and Common Pool Resources. *World Development*, 30 (1), 95-105.
- Braverman, A., dan Guasch, J. L. (1993). Administrative failures in Government Credits Programs. Dalam K. Hoff, A. Braverman & J. E. Stiglitz (Eds.), *The Economics of Rural Organization: Theory, Practice and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Coleman, B. E. (2006). Microfinance in Northeast Thailand: Who benefits and how much? *World Development*, 34 (9), 1612-1638.
- Djojohadikusumo, S. (1989). *Kredit Rakyat*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)
- Febriamansyah, R., Mahdi, Ifdal, dan Syahni, R. (2002). *Evaluasi Pelaksanaan Pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), PKP 2000, PKPP dan PPA 2001, di Pulau Sumatera*. Paper dipaparkan pada Workshop Evaluasi Kinerja Pembangunan Pertanian 1997-2002. Cisarua – Bogor.
- Febriamansyah, R., Syahni, R., Mahdi, dan Ifdal. (2003). How to deliver a financial assistance for rural communities?: A case study of BLM projects in Sumatra Island. *Jurnal Stigma: an agricultural science journal*, XI (4).
- Patten, R. H., Rosengard, J. k., dan Johnston, J. R. D. E. (2001). Microfinance Success Amidst Macroeconomic Failure: The Experience of Bank Rakyat Indonesia During the East Asian Crisis. *World Development*, 29 (6), 1057-1069.
- Rahman, A. (1999). Micro-credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays? *World Development*, 27 (1), 67-82.
- Tedeschi, G. A. (2006). Here today, gone tomorrow: Can dynamic incentives make microfinance more flexible? *Journal of Development Economics*, 80 (1), 84-105.